

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Turki dan Israel dalam lima tahun terakhir belum kunjung membaik. Setelah lebih kurang enam puluh satu tahun Turki dan Israel menjalin hubungan diplomatik, kini hubungan dua negara yang pernah menjadi sekutu terdekat di Timur Tengah itu terjebak dalam situasi konflik. Sejak pecahnya tragedi Mavi Marmara pada 31 Mei 2010, Turki secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan Turki untuk putus hubungan dengan Israel bukan tanpa alasan, melainkan akibat tindakan Israel mengirim pasukan militer untuk menyerang kapal Mavi Marmara, di wilayah perairan internasional.

Mavi Marmara merupakan kapal milik NGO Turki bernama *İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH)* atau *The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief* atau biasa disebut sebagai *Humanitarian Relief Foundation (HRF)* (TRTWorld, 2015). Kapal berpenumpang aktivis kemanusiaan dari berbagai LSM dan dari beberapa negara ini berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam misi *the Gaza Freedom Flotilla*. Akan tetapi, ketika tengah berlayar di perairan internasional kawasan Mediterania sebelah utara Gaza, Mavi Marmara diserang oleh militer Israel. Mereka datang dari helikopter dengan bersenjatakan senapan, granat setrum dan gas air mata (Black, 2010).

Serangan militer Israel menimbulkan banyak korban jiwa di pihak aktivis yang tergabung dalam misi tersebut. Sedikitnya sembilan aktivis Turki, delapan diantaranya warga negara Turki dan satu keturunan Turki-Amerika tewas dalam operasi ini (Assegaf, 2010). Sedangkan korban luka dialami oleh lebih dari 20 aktivis dan 10 awak kapal (Migdalovitz, 2010). Sementara di pihak Israel setidaknya terdapat tujuh tentara mengalami luka-luka, dan satu diantaranya terluka parah (Kershner, 2010).

Setelah seluruh penumpang ditangkap, mereka dialihkan ke Ashdod untuk ditahan, termasuk para wartawan yang turut dalam pelayaran kapal Mavi Marmara. Berbagai dokumen yang merekam jejak tragedi Mavi Marmara, seluruh komputasi, alat komunikasi dan fotografi peralatan kapal disita dan tidak satu pun dikembalikan (Guilfoyle, 2011). Selama masa tahanan seluruh penumpang diperlakukan layaknya tawanan perang, permintaan atas akses konsular ditolak, mereka juga tidak memperoleh makanan dan fasilitas kesehatan yang layak (Guilfoyle, 2011).

Mereka justru dipaksa menandatangani sejumlah dokumen dalam bahasa Hebrew (Guilfoyle, 2011). Beberapa penumpang yang menolak menandatangani dokumen diintimidasi hingga mendapat kekerasan fisik dari pihak Israel (Kafdagli, 2014). Serangan bersenjata ini menimbulkan amarah bagi Turki karena militer Israel berani menyerang penumpang yang menurut Turki tidak dapat dikategorikan sebagai pasukan bersenjata melainkan warga sipil (Bekdil, 2015).

Merespon tindakan tersebut, Turki segera menarik Duta Besarnya di Tel Aviv dan mengusir Duta Besar Israel untuk Turki di Ankara. Lebih jauh, Turki mengambil langkah untuk menurunkan status hubungan diplomatik dari yang semula Kedutaan Besar menjadi Sekretaris Kedua (Utami, 2012). Turki juga menghentikan kerjasama di bidang militer, diantaranya pelatihan militer gabungan yang dalam kerangka kerja *Military Training Cooperation Agreement* (MTCA) telah menjadi agenda tahunan sejak 1998; pembekuan proyek *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)* sebagai misal *upgrading* pesawat F4 *Phantom* yang menelan biaya \$650 juta Dollar AS serta pengembangan pesawat tanpa awak Heron yang dijalankan di bawah pengawasan *Israel Aerospace Industries* (Handayani, 2012; Sasley, 1998). Demikian pula dengan pertukaran informasi intelijen antara kedua negara sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian strategis paling komprehensif ini pun dihentikan (Stern & Ross, 2013).

Langkah yang diambil Turki sebagai respon atas tragedi Mavi Marmara ini membuat hubungan dengan Israel semakin renggang. Sejak membuka hubungan diplomatik secara resmi pada Maret 1950, ini merupakan kali pertama hubungan keduanya berada pada level paling buruk sepanjang sejarah (Kalin, 2013). Turki mengajukan tiga tuntutan kepada Israel sebagai syarat normalisasi hubungan, diantaranya permohonan maaf, pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban dan pencabutan blokade Gaza.

Maret 2013, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya melayangkan permohonan maaf kepada Turki atas terbunuhnya sembilan

warga sipil dalam serangan di atas Mavi Marmara. Serentetan rekonsiliasi pun dilakukan untuk membicarakan perbaikan hubungan. Akan tetapi, bertahun-tahun rekonsiliasi dilakukan belum nampak adanya deklarasi ‘damai’ dari kedua negara yang bersangkutan. Padahal memperbaiki hubungan dengan Israel menjadi langkah tepat untuk memperkuat pertahanan kawasan mengingat perang terus berkecamuk di sejumlah negara tetangga yang berpotensi merentankan keamanan Turki. Selain itu, mengingat Turki merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, pendekatan hubungan dengan Israel dapat melanjutkan peran yang biasa dilakoninya sebagai mediator dalam konflik yang tengah berkecamuk antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel melalui diplomasi kedua negara yang berdamai (Dzakirin, 2012).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan dapat ditarik garis besar rumusan permasalahan, yaitu :

Mengapa pasca tragedi Mavi Marmara sejak tahun 2011 hingga 2016 Turki tidak segera normalisasi hubungan dengan Israel?

C. Kerangka Berpikir

Yang dimaksud peneliti dengan kata ‘normalisasi’ di sini ialah suatu keadaan dimana dua negara yang tengah berkonflik membuat keputusan secara sadar untuk keluar dari masa ketegangan dengan memperbaiki hubungan. Tolak ukur perbaikan hubungan yang digunakan ialah sampai pada

dibukanya kembali status hubungan diplomatik seperti sedia kala, yaitu hubungan yang mencapai tingkat Kedutaan Besar.

Dalam penelitian ini, penulis melihat pokok bahasan dari satu pihak, yaitu dari sudut pandang Turki sebagai negara yang menjadi “korban” tragedi Mavi Marmara. Sedangkan untuk menganalisa penyebab lambatnya normalisasi hubungan Turki – Israel akan dijelaskan dengan menggunakan teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Process*) oleh William D. Coplin.

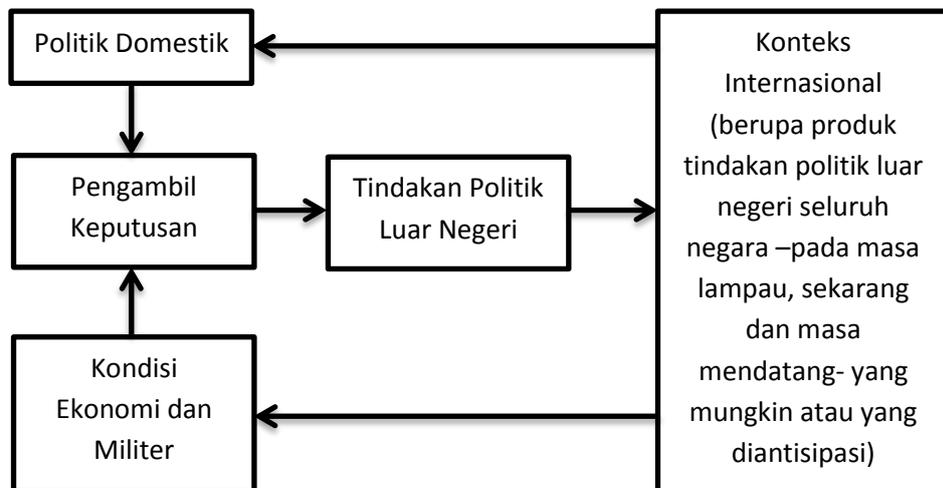
1. Teori Pengambilan Keputusan

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (1969, hal. 127) adalah strategi atau rencana tindakan yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Dimana ketika negara-negara tersebut bermain peran dalam hubungannya dengan dunia internasional, kepentingan yang dibawa ialah kepentingan negara dan tujuan yang ingin dicapai ialah tujuan negara. Mengingat hal itu, politik luar negeri tidak dapat diputuskan secara sembarangan sebab dihadapkan pada ketidakpastian, resiko dan taruhan yang tinggi (Mintz & Jr., 2010, hal. 3). Oleh karena itu, untuk menentukan politik luar negeri yang diambil oleh suatu negara ditentukan melalui prosedur pengambilan keputusan.

Pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara sebagaimana dijelaskan oleh Robinson dan Synder (1965) secara umum

diputuskan melalui empat prosedur, yaitu 1). Mengidentifikasi permasalahan kebijakan, 2). Mencari alternatif, 3). Memilih alternatif, dan 4). Melaksanakan alternatif yang dipilih (dikutip dalam Mintz & Jr., 2010, hal. 4). Lebih lanjut William D. Coplin dalam bukunya *Introduction to International Policy* menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor dasar, yaitu situasi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta kedudukan negara dalam konteks sistem internasional.

Gambaran bagaimana empat determinan tersebut mempengaruhi tindakan politik luar negeri



Sumber: Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (2nd ed.). (M. Marbun, Trans.) Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal.30

- a. Situasi politik domestik. Bahwa dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat hubungan erat antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri (*policy influencers*). Dimana aktor politik dalam negeri (*policy influencers*)

berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka (Coplin, 2003, hal. 74). Coplin menyebut hubungan ini sebagai sebuah sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) yang akan bekerja secara simbiosis mutualisme.

Bagi pengambil keputusan politik luar negeri, posisi *policy influencers* merupakan sumber dukungan bagi rezim mereka (Coplin, 2003, hal. 76). Sedangkan bagi *policy influencers*, pengambil keputusan dibutuhkan untuk memperlancar jalan politik dalam negeri atau mendapat penghormatan dari negara lain (Coplin, 2003, hal. 76). Meski terkadang tidak semua tuntutan *policy influencers* terpenuhi, setidaknya ada beberapa diantaranya atau sebagian kecil yang terpenuhi. Jika tidak, besar kemungkinan dukungan terhadapnya hilang.

Policy influence system ini memainkan peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Untuk mengetahui peran politik dalam negeri, Coplin membaginya ke dalam empat kategori, yaitu birokrat, partisan, kelompok kepentingan, dan opini publik. Dalam kasus ini, terdapat tiga kategori aktor dalam negeri yang berkontribusi memberi pertimbangan kepada pengambil keputusan luar negeri Turki, yaitu birokrat, partisan dan opini publik.

Birokrat (*bureaucratic influencer*) dapat terdiri dari individu maupun organisasi dalam lembaga eksekutif pemerintah, fungsinya membantu dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan.

Akan tetapi, oleh karena kedua pihak bekerja dalam satu lembaga, anggota birokrasi terkadang juga merupakan anggota kelompok pengambil keputusan. Pada kondisi demikian, Coplin menyebut bahwa terkadang sulit membedakan antara birokrat yang bertindak sebagai *policy influencers* dari pengambil keputusan (Coplin, 2003, hal. 82).

Dalam kasus Turki, posisi birokrat dijabat oleh presiden, menteri-menteri yang memayungi tiap unit kebijakan dan perdana menteri itu sendiri (Turkish Elections, 2010). Posisi perdana menteri yang di saat itu masih dijabat oleh Recep Tayyip Erdogan dipandang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan kebijakan Turki. Hal ini karena Erdogan dapat memainkan dua peran sebagai pengaruh kebijakan sekaligus pengambil keputusan. Menurut majalah *Time* Erdogan merupakan sosok “Islamis moderat dan tegas membela demokrasi sekuler”, serta “pemimpin dunia paling berpengaruh” (Alfian, 2015).

Partisan (*partisan influencers*) diartikan sebagai representatif dari suara rakyat yang berusaha menerjemahkan tuntutan rakyat menjadi agenda politik. Di dalam parlemen terdapat setidaknya perwakilan partai politik yang memiliki andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. *Partisan influencers* ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri jika dipandang telah menyeret kebijakan dalam negeri yang sifatnya kritis.

Kebijakan Turki dalam merespon serangan militer Israel terhadap Mavi Marmara tidak terlepas dari pengaruh partai politik di Turki. Partai politik berupaya mendukung pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menindak tegas tindakan yang dilakukan Israel terhadap Turki. Disamping itu tragedi berdarah Mavi Marmara mengundang simpati masyarakat Turki sehingga membuat partai politik angkat suara mendukung pemerintah untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Terutama AKP yang telah berkuasa sejak tahun 2002 telah sejak awal mendukung pelayaran Mavi Marmara.

Pengambilan kebijakan luar negeri dapat pula dipengaruhi oleh opini yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Opini publik (*mass influencers*) tentang krisis tertentu dapat mempengaruhi penggunaan kekuatan, eskalasi, terminasi, dan keputusan kebijakan luar negeri lainnya (Mintz & Jr., 2010, hal. 131). Masyarakat dapat menekan pemerintah untuk segera bertindak. Pasca penyerangan Mavi Marmara oleh Israel, demonstrasi pecah di beberapa titik kota Ankara. Para demonstran juga berunjuk rasa di depan kantor Konsulat Israel di Istanbul (Zacharia, 2010). Mereka menyebut Israel sebagai pembunuh, penjajah dan bajak laut (Sidman, 2010).

- b. Kemampuan ekonomi dan militer negara. Kemampuan ekonomi yang disandang sebuah negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri negara itu (Coplin, 2003, hal. 115). Kuat lemahnya ekonomi negara menjadi pertimbangan penting dalam mendukung politik luar

negeri yang dicetuskan. Oleh karena ekonomi yang kuat dapat menopang kebutuhan dalam negeri, sehingga mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan politik luar negerinya terhadap ekonomi negara. Atau dengan kata lain sebagai basis bagi kekuatan negara untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya tersebut.

W.W Rostow mengkategorikan Turki sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi berada pada level tiga, yaitu Masyarakat Transnasional (Coplin, 2003, hal. 115). Level ini terdiri atas negara-negara yang ekonominya sedang berkembang, dimana terdapat peluang untuk tumbuh, tetapi membutuhkan waktu lama (Coplin, 2003, hal. 120). Berbanding terbalik dari itu, Turki yang sebelumnya berada di posisi 116 ekonomi terpuruk pada 2010 melejit naik menempati urutan ekonomi ke 17 (Alfian, 2015) dan masuk dalam kategori negara dengan ekonomi terkuat dunia (G-20).

Demi mengimbangi kemajuan ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa membuat Turki tumbuh menjadi negara industri, terutama industri manufaktur. Menurut Ernest dan Young dalam “*Merger and Acquisitions Barometer Report*”, pada 2012 volume investasi di Turki adalah yang tertinggi di Eropa Tengah dan Eropa Tenggara, yaitu sebanyak 297 transaksi dengan nilai investasi mencapai USD 18 miliar dan sebagian besar pada sektor otomotif (GOV.UK, 2014). Akhir 2014 lalu, industri otomotif Turki menjadi yang terbesar dalam menyumbang penjualan kendaraan komersial

ringan di Eropa (The Rep. of Turkey Prime Ministry, 2014). Perkembangan ekonomi Turki yang demikian pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negerinya terhadap Israel.

Kemampuan militer suatu negara turut menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan luar negeri. Dalam dunia internasional, militer memegang peran besar sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, baik menyerang dan atau mempertahankan diri. Untuk mengetahui seberapa kuat armada militer yang dimiliki suatu negara dapat dilihat dari jumlah personel yang dibekali keterampilan untuk menyerang dan pertahanan serta seberapa lengkap sistem persenjataan yang dimiliki.

Bergabungnya Turki dalam keanggotaan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) membuat negara ini terlibat dalam aliansi militer; berupa latihan bersama dengan negara-negara anggota NATO. Turki juga mampu menggelontorkan anggaran militer hingga 18.2 miliar Dolar AS (Bender, 2014). Dengan ini Turki mampu mendukung penguatan di sektor militer guna meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayahnya.

Dikutip dari www.globalfirepower.com kekuatan militer Turki pada 2015 ini berada di posisi 10 teratas dunia yang bahkan mengalahkan Israel yang lebih rendah di bawahnya (GFP, 2015). Oleh karena itu, meski Turki tidak lagi mendapat pasokan senjata dari

Israel, melalui anggaran militer yang besar, Turki dapat mencari alternatif dengan membeli perlengkapan militer dari negara lain.

- c. Konteks internasional. Menurut Coplin (2003, hal. 165) sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi dalam sistem internasional akan menentukan perilaku negara. Sedangkan lingkungan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah negara dalam memainkan peran internasional dapat dilihat dari konteks geografis, hubungan politik – ekonomi antara negara tersebut dengan negara-negara lain, dan pergerakan militer (Coplin, 2003).

Dalam kaitannya dengan kedudukan internasional, Turki merupakan bagian dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Keaktifan Turki sebagai anggota OKI menjadi kesempatan untuk menebar pengaruh bagi perkembangan dan kemajuan Dunia Islam maupun terhadap negara anggota lain. Secara politik, Turki juga memiliki sensitifitas tinggi terhadap beragam isu yang menggema di Timur Tengah.

Turki yang selama ini dikenal sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim memiliki keterikatan dengan kebijakan yang diambil oleh negara-negara Timur Tengah. Meski Turki secara geografis tidak masuk dalam negara Timur Tengah, politik luar negeri yang berkecamuk di Timur Tengah menjadi suatu isu yang diperhitungkan oleh Turki untuk terlibat dalam pusaran politik. Terutama dalam perang Israel – Palestina, Turki menolak

blokade yang dilakukan oleh Israel. Ia menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Demikian pula dengan OKI. OKI mendukung kemerdekaan Palestina dan perjuangan pencabutan blokade Gaza dan Turki merupakan anggota OKI. Oleh karena itu, dengan memberikan prioritas yang lebih besar ke Timur Tengah Turki mendapat kepercayaan dan simpati dari negara-negara Dunia Islam. Selain itu, dukungan Turki terhadap Palestina membuat OKI mendukung kebijakan Turki memutus hubungan dengan Israel.

D. Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik dugaan sementara bahwa normalisasi hubungan Turki – Israel berjalan lambat karena dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor internal

- a. Politik dalam negeri Turki, diantaranya dukungan parlemen Turki yang didominasi partai politik *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP); dominasi Perdana Menteri Erdogan dalam pengambilan keputusan; opini publik Turki melalui serentetan aksi demonstrasi mendukung pemerintah menuntut Israel bertanggung jawab atas penyerbuan Mavi Marmara.
- b. Kemampuan ekonomi Turki yang mampu bertahan di tengah badai krisis ekonomi global.

c. Peningkatan kekuatan militer Turki yang menempatkan negeri ini lebih unggul satu level di atas Israel mendukung upaya Turki untuk tetap menjaga jarak dengan Israel. Keanggotaan Turki di NATO menjadikan negara ini sebagai mitra strategis negara-negara anggotanya. Dengan terlibat dalam beberapa operasi dan latihan militer bersama memberi kesempatan bagi Turki memperluas kerjasama dengan negara-negara anggota untuk menggantikan peran yang selama ini dimainkan oleh Israel.

2. Faktor eksternal

Menjadi bagian dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi salah satu pendorong bagi Turki untuk lebih mengedepankan solidaritas Islam daripada berkawan dengan Israel. Selain itu, karena Turki telah memberikan prioritas yang lebih besar pada negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah, seperti dukungan Turki terhadap kemerdekaan Palestina, maka dukungan dari OKI terhadap Turki juga besar.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder. Dimana pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel. Ditambah menggunakan data yang diunduh dari situs-situs online dari internet seperti media-media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian yang penulis teliti.

2. Deskriptif

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti pada suatu waktu tertentu (Apriyanto, 2008). Melalui analisis deskriptif ini dapat menerangkan apa yang telah terjadi selama periode yang diambil, serta menjelaskan pula perihal mengapa hal itu terjadi (Coplin, 2003).

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran Miles dan Huberman dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga tahap, diantaranya mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan hingga data yang terkumpul saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis (Apriyanto, 2008).

F. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel. Kemudian untuk mengetahui sebab-sebab perbaikan hubungan antara Turki – Israel setelah peristiwa Mavi Marmara selama lima tahun ini berjalan lambat.

Dari tujuan yang terpapar di atas, melalui skripsi ini diharapkan dapat menyumbang ilmu dalam menganalisa suatu kasus lewat kaca mata Hubungan Internasional melalui teori-teori yang telah dipelajari selama

perkuliahan. Adapun tujuan yang penulis harapkan ialah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini ialah faktor-faktor yang menyebabkan normalisasi hubungan Turki – Israel berjalan lambat bahkan tidak kunjung membuahkan kesepakatan damai. Untuk membatasi topik pembahasan, penulis akan lebih menekankan pada kebijakan yang diambil Turki dalam merespon tindakan Israel setelah tragedi Mavi Marmara dan kepentingan yang dibawa oleh Turki melalui kebijakan tersebut. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis membatasi periode penelitian selama empat tahun, yaitu dimulai dari tahun 2011 sejak Turki memutuskan hubungan diplomatik hingga 2016 ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab. Dimana pada tiap-tiap bab akan menjabarkan topik pembahasan secara rinci ke dalam beberapa sub bab yang satu sama lainnya saling berhubungan. Sehingga akan diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis. Dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang dinamika hubungan Turki – Israel pasca penandatanganan *Military Training Agreement* (MTA) tahun 1996, dan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel selama berada dibawah pemerintahan AKP sejak 2002 hingga 2010 sebelum peristiwa Mavi Marmara.

BAB III berisi tentang motif dan tujuan Mavi Marmara, kronologi kejadian Mavi Marmara, respon Turki dan dunia internasional terhadap peristiwa tersebut, dampak tragedi Mavi Marmara bagi hubungan kedua negara, khususnya yang tertuang dalam kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Israel tahun 2010-2016. Pada bab ini juga mencakup upaya-upaya apa saja yang ditempuh kedua belah pihak dalam rangka perbaikan hubungan.

BAB IV berisi tentang faktor penghambat normalisasi hubungan Turki – Israel yang akan dibagi ke dalam dua sub-bab utama, yaitu faktor internal dan eksternal serta mengapa hal tersebut mempengaruhi. Lebih lanjut, akan dibahas aktor-aktor siapa saja yang paling berperan dalam menentukan kebijakan tersebut dalam sudut pandang Turki.

BAB V berisi kesimpulan yang berupa rangkuman dari berbagai penjelasan yang sebelumnya terjabar dari BAB I hingga BAB IV, sekaligus penutup.